

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH (DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI) DALAM MENANGGULANGI
MASALAH PENYELUNDUPAN MANUSIA**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:
Sam Fernando
NIM. 106010103111034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

POLITIK HUKUM PEMERINTAH (DI REKTORAT JENDERAL IMIGRASI) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PENYELUNDUPAN MANUSIA

Oleh:
Sam Fernando¹; Isrok²; dan Moch Ridwan³
82bintangsenja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengamati masalah politik hukum pemerintah (Direktorat Imigrasi) dalam menanggulangi masalah Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*). *People smuggling* merupakan kejahatan lintas Negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal asia selatan dan timur tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materiil, Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penyelundupan Manusia

Abstract

This research studied the political law (Directorate general of Immigration) in overcoming people smuggling problem. people smuggling is a transnational crime putting illegal immigrants and refugees from south asian and middle east contries as commodity in auttemps of producing material profit, a great potencial for trannational crimes in Indonesia is a problem that needs special consideration. thus there should be a review of the issues associated with the problem of transnational crimes that hit Indonesia.

Key Words : *Politic of Law, People Smuggling*

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

² Dosen pengajar Universitas Brawijaya Program Magister Ilmu Hukum bidang keilmuan Hukum Tata Negara

³ Dosen pengajar Universitas Brawijaya Program Magister Ilmu Hukum bidang keilmuan HAM

PENDAHULUAN

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional. Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi pada tahun 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya

manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnya yang bersifat materi. Bencana alam pun menjadi salah satu masalah yang kemudian dipertanyakan sebab-musabab munculnya terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kejahatan transnasional “berhasil” menjadi masalah bersama, masalah di negara-negara dunia; menjadi masalah nasional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan.

Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala

dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridis dan diplomatik.

Dengan kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia sebagai Negara tujuan yang dituju oleh sebagian besar Negara-negara luar. Terutama Negara-negara yang tingkat kehidupannya sudah maju, sedangkan bagi Negara-negara yang masih tertinggal, Indonesia dijadikan sebagai Negara Transit untuk mencapai Negara tujuan.

Dari tahun ketahun imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Department of State* pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional⁴.

Di Indonesia sendiri hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai dengan tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran gelap baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh.

Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol tambahan mengenai penyelundupan migran. Praktek penyelundupan orang atau *people smuggling* telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara.

People smuggling umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal. *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap.

Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “**Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi)**

⁴ INTERPOL,(2010):*PeopleSmuggling*. Diakses dari <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmugglin/g/default.asp>

Dalam Menanggulangi masalah Penyelundupan Manusia”

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana politik hukum Pemerintah di Indonesia (Direktorat Imigrasi) dalam menanggulangi masalah Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) ? (2) Bagaimanakah Aturan Yang Mengatur Mengenai Penyelundupan Manusia di Indonesia?

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Karena menyangkut politik hukum, artinya hukum yang dicita-citakan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan dan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Karena menyangkut politik hukum, artinya hukum yang dicita-citakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Secara Transnasional Atas Masalah Penyelundupan Manusia

People smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindakan pidana yang saling kait mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya persengkongkolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundup orang mengakibatkan semakin

meningkatnya jumlah imigran gelap.

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) dapat diartikan mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal.⁵ Masuk secara ilegal berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal.

Penyelundupan Manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang, yaitu ada unsur PROSES, CARA dan TUJUAN. Unsur PROSES adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur CARA adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migrant mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara ilegal. Sedangkan unsur TUJUAN yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara ilegal. Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan

⁵ Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia

kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya.

Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyelundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang meng-eksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & trafiker) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Dalam menganalisa masalah tersebut, perlu dilakukan bahasan kelemahan dan ketidakserasian antar hukum atau Undang-Undang yang berlaku, terutama di Indonesia, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan manusia secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tentang Status Pengungsi, dapat diketahui bahwa pengungsi bukanlah merupakan pernyataan pribadi, melainkan suatu status yang ditentukan melalui sebuah proses. Dengan keberadaan UNHCR di Jakarta, banyak para imigran gelap yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga

status dan solusi bagi mereka didapatkan. Namun demikian, tidak semua orang asing yang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan status sebagai '**refugee**' oleh UNHCR tersebut.

Setelah para imigran mendapatkan status sebagai pengungsi, mereka memiliki kewajiban untuk menghormati setiap aturan negara di mana tempat mereka diberikan penampungan. Pemerintah Republik Indonesia akan memberi kesempatan bagi para pengungsi untuk tinggal sementara di wilayah Indonesia sampai ditemukan negara ketiga sebagai tempat pemindahan. Dan apabila UNHCR menolak untuk memberikan status *refugee* (pengungsi) kepada imigran, seharusnya Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mendeportasi mereka, malangnya dengan biaya Pemerintah RI sendiri, atau mereka dapat kembali dengan suka rela ke negara asal dengan bantuan dana IOM. Yang menjadi masalah kemudian adalah Negara Indonesia yang tidak mampu mengalokasikan dana anggaran secara rutin untuk mendeportasi para imigran gelap tersebut, dan dalam kenyataannya mereka tetap tidak mau kembali secara sukarela sehingga Indonesia tidak

mendapat dana bantuan dari IOM.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun demikian Undang-Undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia sudah di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, namun hal yang mengatur tentang korban perdagangan /penyelundupan manusia masih sangat lemah yang terdapat pada pasal 86 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian seolah – olah *refuge* tersebut sangat berharga sedang kita bukan Negara yang meratifikasi protokol 51 tersebut yang dampaknya kelak akan semakin mengambang dan mau dikemanakan *refuge* tersebut apabila tidak sama sekali memperoleh statusnya sebagai *refuge* apa yang Negara ini akan lakukan?

Bilamana undang-undang kita sendiri yang mengatur hal tersebut melemahkan Negara kita apakah kita hanya tinggal diam melihat itu semua dan ataukah kita harus berbuat, padahal, fenomena masuknya imigran gelap ke Indoneisa tersebut sudah memenuhi syarat sebagai

people smuggling, namun karena ketiadaan yang mengatur hal tersebut maka Polri serta imigrasi hanya menggunakan Undang-Undang Imigrasi dalam proses penyidikan. Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsel *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia.

Lalu lintas keluar dan masuk orang dari dan ke dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Imirasi No 6 Tahun 2011. Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak dari imigran yang masuk secara ilegal dan berlindung dibalik status pengungsi atau pencari suaka belum dapat dipastikan bisa mendapatkan status tersebut dari UNHCR sehingga hukum di Indonesia terabaikan.

Selain itu, imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan orang, padahal Undang-Undang tentang *people smuggling* tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para penyelundup) dalam penyelundupan manusia, dan mereka juga terjerat oleh hukum Australia. Contohnya adalah kasus Abdul Hamid, warga negara Indonesia asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikenakan hukuman penjara

⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2010): *Imigran Ilegal Saat Diketahui Berada Di Indonesia Dikenakan Tindakan Keimigrasian*. Diakses dari http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content &task=view&id=375&Itemid=34

selama enam tahun oleh Pengadilan Perth, Australia Barat, karena terbukti bersalah menyelundupkan tiga warga Iran dan sembilan warga Afghanistan ke negara itu pada 29 September 2008.⁷

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 yang selama ini mengatur tentang imigran yang mencari status sebagai pencari suaka atau pengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut kurang menegaskan eksistensi fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dampak yang timbul dari migran ini sebagaimana disebutkan di atas, Penulis jelaskan sebagai berikut :

- i. Dampak secara ideology adalah masuk atau keluarnya orang tanpa di lengkapi dengan berbagai dokumen dan maksud kedatangan atau kepergiannya. Tentunya hal ini bisa membayakan terhadap nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan sesuai dengan nilai-nilai dasar di Negara Indonesia. Ideologi sebagai hal yang paling mendasar, karena terjadinya penyelundupan manusia, baik kedalam maupun keluar bisa

membawa pengaruh pola kehidupan bernegara utamanya. Karena ideology yang ada dari luar belum tentu sesuai dengan falsafat dan pandangan hidup Negara Indonesia.

- ii. Dampak secara politik adalah penyelundupan manusia apalagi dalam jumlah besar dan arena latar belakang terjadi karena politik sangat membawa dampak yang besar bagi suatu Negara. Misalnya penyelundupan orang Iran ke Australia, karena belum mendapat izin masuk di Australia, mereka terdampar di Indonesia. Hal ini menjadi beban bagi Negara Indonesia, karena suatu kepedulian manusia. Sehingga bisa mempengaruhi hubungan Negara secara politik, dalam hal ini tiga hubungan politik yang terkait adalah Negara Indonesia sebagai Negara transit, Australia sebagai Negara yang menjadi tujuan migrant, dan Iran sebagai Negara asal.
- iii. Dampak secara ekonomi adalah masuk atau keluarnya orang tanpa di lengkapi dengan dokumen perjalanan dalam pandangan secara ekonomi tentu saja visa yang diterapkan dengan mengenakan biaya masuk bagi orang asing berkurang bagi devisa Negara. Kemudian devisa itu dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik untuk fisik maupun non fisik. Selain itu persaingan dalam bisnis kemudian bisa melemahkan bagi usaha orang Indonesia asli. Karena orang asing yang diselundupkan sebagai buruh tentu saja bisa lebih murah. Demikian juga ekonomi kita banyak tersedot bagi kegiatan yang bersifat sex komersial.

⁷ ibid

- iv. Dampak secara sosial budaya adalah, masuknya orang asing yang diselundupkan, dengan tidak melalui izin yang sah dan resmi. Banyak membawa pengaruh sosial kehidupan warga Negara kita sendiri. Demikian pula warga Negara kita yang diselundupkan keluar, bila sudah kembali pengaruh budaya yang di bawa banyak menciptakan budaya baru dan tidak sesuai dengan budaya kita sendiri.
- v. Dampak secara keamanan nasional adalah banyak penyelundupan baik dari dalam negeri ke luar negeri, maupun sebaliknya justru menciptakan kerawanan bagi keamanan Negara. Karena maksud kedatangan mereka tentu saja dilatar belakangi dengan berbagai motif atau kepentingan. Bila selundupan orang asing tersebut ke Indonesia tanpa ditangani dengan baik. Bisa menimbulkan masalah tindak pelanggaran hukum Indonesia, seperti kejahatan bisa meningkat seperti perampokan atau pencurian dari mereka. Karena didorong oleh kebutuhan mereka sendiri. Kehidupan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya melakukan tindak kejahatan. Belum lagi karena ada kepentingan lain untuk masuk dengan cara diselundupkan seperti kegiatan terorisme daln lain-lain.
- vi. Dampak secara kerawanan imigrasi adalah kerawanan imigrasi jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian yaitu izin tinggal bagi yang masuk dan keluar

wilayah Republik Indonesia. Untuk bisa masuk atau keluar, maka memunculkan modus baru berupa pemalsuan paspor, visa dan izin tinggal dan sebagainya.

Usaha yang baru dilakukan saat ini baru berupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Namun usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal dengan ketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari *people smuggling*.

2. Pandangan Material dalam Negara Hukum Indonesia dalam Memandang perbuatan Penyelundupan Manusia beserta korban (*Victim*)

Philip Martin dan Mark Miller⁸ menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat

⁸ Martin , Philip & Mark Miller, (2000): *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*. International Migration Review, Vol. 34, No. 3 (Autumn, 2000), Hal.969-975

tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki.

Sehingga dalam hal ini Penulis berpendapat, bahwa *People Smugling* adalah korban dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh *Smuglernya* atau penyelundup tersebut. Hanya saja kebijakan hukum pidana belum menyentuh mengenai penyelundup ini sebagai suatu pelaku yang masuk dalam kategori orang yang menyuruh atau memaksa seseorang atau orang lain untuk memasuki suatu Negara.

Meskipun demikian, orang yang diselundupkan sebagai korban. Juga memang karena kultur kita yang ramah ini dijadikan tujuan utama. Apalagi secara hukum melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 yang selama ini mengatur tentang imigran yang mencari status sebagai pencari suaka atau pengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut kurang menegaskan eksistensi fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha yang baru dilakukan saat

ini baru berupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Namun usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal dengan ketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari *people smuggling*.

Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang-Undang yang tegas dalam menangani *people smuggling* sementara Indonesia tidak memilikinya.

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah *people smuggling* ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Para imigran memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia, seperti memanfaatkan medan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan memasuki pintu-pintu yang tidak resmi, memanfaatkan keberadaan UNHCR di Jakarta,

bahkan menjadikan korban perang sebagai alasan dan berkilah bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit sebelum ke Australia, padahal sesungguhnya tujuannya memang ke Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian – uraian dalam bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Suatu kejahatan menjadi “kejahatan transnasional”, jika kejahatan tersebut:
 - a. Dilakukan lebih dari satu negara;
 - b. Persiapan, perencanaan, pengarah dan pengawasan dilakukan di negara lain;
 - c. Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara;
 - d. Berdampak serius bagi negara lain.

Ketentuan hukum Indonesia dapat diterapkan dalam kejahatan transnasional selain ketentuan dalam KUHP, juga undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu, yaitu: Undang – undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian Usaha saat ini berupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Namun usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal dengan ketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari *people smuggling*.

2. Perlunya kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, dalam

kerangka ASEAN telah dicapai beberapa bentuk kesepakatan baik berbentuk perjanjian maupun pernyataan, bentuk kesepakatan yang dimaksud adalah:

- a. ASEAN Plan of Action to combat Transnasional Crimes yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
- b. Treaty on Mutual legal assistance in Criminal Matters (MLAT) ditandatangani tahun 2006; dan
- c. Agreement of information Exchange and Establishment of communication Procedures ditandatangani tahun 2002.

Tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan tersebut telah mencerminkan adanya “**pemaksaan**” secara kolektif terhadap setiap negara untuk melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan ini dalam era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Friedrich Heckmann, 2004, *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*. International Migration Review, Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration
- Gordon H. Hanson, 2007, *The Economic Logic of Illegal Migration*. Council Special Reports (CSR) No. 26, April. USA: Council on Foreign Relations
- Jean B. Grossman, 1984, *Illegal Immigrants and Domestic Employment*. Industrial and Labor Relation Review, Vol. 37, No. 2
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar Baru, 1994)
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Study Tentang Integrasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Citra Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang*, Makalah, (Jakarta, 1995).
- Michael P. Todaro & Lydia Marusko, 1987, *Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework*. Population and Development Review, Vol. 13, No. 1
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, (Jakarta, 1988)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Philipus Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)
- Philip Martin & Mark Miller, 2000, *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*. International Migration Review, Vol. 34, No. 3 Autumn.
- Richard Mines & Alain de Janvry, 1982, *Migration to the United States and Mexican*

Rural Development: A Case Study. American Journal of Agricultural Economics, Vol 64.

&task=view&id=375&Itemid=34
Republika.co.id (12 Januari 2012), diunduh tanggal 5 Mei 2012.

Samijo, Ilmu Negara, (Bandung, Armico, 1995)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007)

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983)

W.Friedmann, *Legal Theory*, (New York, Columbia University Press, 1967)

2. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lampiran Negara Tahun 2006, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

3. Sumber lainnya

Berita Nasional, 25 Juli 2010

INTERPOL, (2010): *People Smuggling*. Diakses dari <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.asp>

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2010): *Imigran Ilegal Saat Diketahui Berada Di Indonesia Dikenakan Tindakan Keimigrasian*. Diakses dari http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content